

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur :

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Anshori, Abddul G dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam, bagian penerbitan universitas islam Indonesia*, Yogyakarta, 1985.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Hanitijo, Soemitro R, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Irawan, Chandra S, *Perkawinan dalam Islam ; Monogami dan Poligami?*, An-Naba Islamic Media, Yogyakarta, 2007.
- M, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Manan, Abdul dan Fauzan, *Pokok-Pokok Perdata : Wewenang Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, 2022.
- Melilia, Djaya S, *Masalah Perkawinan Antara Agama dan Kepercayaan di Indonesia*, Irama Widya Dharma, Bandung, 1988.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Prenada Kencana, Jakarta, 2006.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1988.

Rahman, Bakri A dan Ahmad Sukardja, *Hukum Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hindakarya Agung, Jakarta, 1981.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Satriyo, *Asas – Asas Hukum Perdata*, Hersa, Purwokerto, 1998.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1986.

Subekti, Trusto, *Hukum Keluarga dan Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2014.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) dengan tambahan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Pokok Agraria*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011.

Wienarsih, Subekti, dan Sri Soesilowati, *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006.

Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Junral :

Alinapia, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No.04, 2014, hlm.370-384.

Rusli, Tami, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Pranata Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2013, hlm.156-167.

Sumber Lain:

Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1625/PDT.G/2022/PA.BKS

Shidarta, Maret 2019, “Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi”, tersedia di halaman <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi>, diakses pada 10 Oktober 2022.

